

KOLABORASI DALAM PENGEMBANGAN KURIKULUM: ANALISIS PERAN STAKEHOLDER DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN

Srilasmi¹, Syamsu A Kamaruddin², Ahmadin³

lasmi1305mei@gmail.com¹, syamsukamaruddin@gmail.com², ahmadin@unm.ac.id³

Universitas Negeri Makassar

ABSTRAK

Kurikulum adalah aspek penting dalam mencapai tujuan pendidikan di Indonesia, yang harus terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pendidikan. Stakeholder pada lingkungan pendidikan merupakan elemen penting dalam pengembangan kurikulum. Stakeholder dalam pengembangan kurikulum sangat dibutuhkan untuk berpartisipasi sehingga relevansi isi kurikulum, dengan kebutuhan aktual peserta didik dapat terlihat dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran stakeholder pada lingkungan pendidikan untuk berkolaborasi dalam pengembangan kurikulum. Dalam penulisan artikel ini, penulis menggunakan pendekatan dan analisis sejarah melalui studi kepustakaan dalam pengumpulan data. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah perkembangan kurikulum di Indonesia yang terjadi sejak tahun 1947 hingga adanya kurikulum merdeka saat ini, peran stakeholder dalam pengembangan kurikulum pada lingkungan pendidikan dalam hal ini disimpulkan bahwa keterlibatan stakeholder akan membantu memastikan bahwa kurikulum relevan dengan kebutuhan peserta didik dan kebutuhan lingkungan sekolah, serta manajemen penerapan kurikulum pada lingkungan pendidikan yang bukan hanya berfokus pada peserta didik melainkan semua pihak yang terlibat pada lembaga pendidikan.

Kata Kunci: Pengembangan Kurikulum, Peran Stakeholder.

ABSTRACT

The curriculum is an important aspect in achieving educational goals in Indonesia, which must continue to be developed in accordance with educational needs. Stakeholders in the educational environment are important players in curriculum development. Stakeholders in curriculum development are needed to participate so that the relevance of the curriculum content, with the actual needs of students, can be seen well. This study aims to find out what the role of stakeholders in the educational environment is to collaborate in curriculum development. In writing this article, the author uses a historical approach and analysis through literature studies in data collection. The results obtained from this study are the development of the curriculum in Indonesia which occurred from 1947 until the existence of the current independent curriculum, the role of stakeholders in curriculum development in the educational environment in this case it was concluded that stakeholder involvement will help ensure that the curriculum is relevant to the needs of students and the needs of the school environment, and the management of curriculum implementation in an educational environment that does not only focus on students but all parties involved in educational institutions.

Keywords: Curriculum Development, Role Of Stakeholders.

PENDAHULUAN

Kurikulum merupakan salah satu aspek penting dalam mewujudkan keberhasilan pendidikan nasional. Hal tersebut dikarenakan kurikulum adalah suatu hal yang berperan strategis pada sistem pendidikan. Kurikulum dalam sistem pendidikan menjadi sebuah sistem untuk mencapai tujuan institusional terhadap lembaga pendidikan, olehnya itu kurikulum sangat berperan penting dalam mewujudkan sekolah yang memiliki kualitas serta bermutu (Fahmi & Bitasari, 2021).

Proses dan arah pendidikan akan terlihat jelas dengan adanya kurikulum. Terdapat banyak dinamika kurikulum dalam hal ini terkait rencana pelaksanaan pendidikan baik pada keadaan kelas, sekolah, daerah maupun lingkup nasional. Terdapat banyak orang-orang terlibat dengan adanya kurikulum. Hal tersebut dikarenakan adanya harapan untuk tumbuh dan berkembang yang dimulai dari orang tua, warga masyarakat, pimpinan formal atau non formal yang selalu memberikan motivasi khususnya bagi anak, Pemuda, serta semua generasi yang terbaik (Fahmi & Bitasari, 2021).

Kurikulum sangat erat kaitannya dengan lembaga pendidikan dalam hal ini sekolah. Dengan adanya kurikulum tujuan pendidikan pada sekolah tersebut akan tercapai. Kurikulum dianggap mampu menjawab setiap rencana dan harapan dengan adanya peran guru dan kepala sekolah pada lembaga pendidikan tersebut. Oleh karena itu, dalam menghadapi perubahan zaman serta tuntutan pendidikan global, kurikulum perlu adanya penyesuaian dan pengembangan (Sholeh et al., 2023).

Stakeholder terkait merupakan pihak paling penting dalam pengembangan kurikulum yang efektif, dalam hal ini kepala sekolah, guru, orang tua serta semua pihak pada lembaga pendidikan. Dalam pengembangan kurikulum, stakeholder tidak hanya memperhatikan kebutuhan serta harapan semua pihak melainkan memberikan pemahaman dan mendapatkan kesepakatan bersama tentang tujuan pendidikan yang ingin dicapai serta bagaimana cara yang harus dilakukan untuk mewujudkan tujuan tersebut.

Penelitian tentang kolaborasi dalam pengembangan kurikulum dan analisis peran stakeholder di lingkungan pendidikan sangat relevan. Dimana akan menggali bagaimana peran stakeholder pada lingkungan pendidikan dalam pengembangan kurikulum.

METODE PENELITIAN

Pada penulisan artikel ini, digunakan pendekatan dan analisis sejarah oleh penulis dengan studi kepustakaan dalam mengumpulkan data. Penulisan artikel ini memanfaatkan data yang diperoleh dari sumber-sumber tertulis seperti buku, artikel ilmiah serta sumber-sumber yang berkaitan dengan pembahasan pada artikel yang akan ditulis. Selanjutnya dilakukan analisis data yang telah ditemukan dan kemudian dilakukan penyusunan setelah dianggap dapat digunakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perkembangan Kurikulum Di Indonesia

Pekembangan kurikulum di Indonesia sudah mengalami perubahan yang secara terus menerus menyesuaikan keberadaan zaman dan kondisi sosial masyarakat Indonesia. Mulai pada tahun 1945 hingga sekarang, ada banyak kurikulum yang pernah berlaku di Indonesia yakni pada tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, 2004, 2006, kurikulum 2013 dan sekarang dikenal dengan Kurikulum Merdeka. Perubahan yang terjadi merupakan hal yang dianggap perlu untuk memperhatikan perkembangan pendidikan di Indonesia (Nurhalim, 2018).

Seringkali pergantian kurikulum di Indonesia diistilahkan “ ganti menteri ganti kurikulum” hal tersebut terlihat ketika terjadi pergantian pemimpin maka seringkali pemimpin menggunakan kekuasaan untuk mengatur sedemikian rupa bagaimana seharusnya pendidikan menurut pemahaman khususnya dalam kerangka kurikulum. Akan tetapi seiring dengan perkembangan zaman keberadaan kurikulum memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kualitas pendidikan yang ada di Indonesia. Olehnya itu perlu dilakukan analisis untuk mengetahui bagaimana perkembangan kurikulum dari masa kemasa untuk melihat perbandingan dan memahami apa yang seharusnya menjadi permasalahan pendidikan di Indonesia.

Kurikulum 1947 “ Rentjana Pelajaran 1947”

Sejak kemerdekaan Indonesia kurikulum rentjana pelajaran 1947 juga mulai diterapkan. Dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah “leer plan” yang berarti rencana pelajaran. Kurikulum ini mulai diberlakukan pada tahun 1950 yang didalamnya terdapat dua hal yakni : jenis-jenis mata pelajaran dan pengajarnya kemudian bagian kedua adalah pokok-poko utama pelaksanaan pembelajaran. Sistem pendidikan Belanda dan Jepang masih mempengaruhi kurikulum ini, dan dianggap sebagai pengganti sistem pendidikan kolonial Belanda (Nurhalim, 2018)..

Kurikulum 1952 “Rentjana Pelajaran terurai 1952”

Kurikulum ini lebih merinci setiap mata pelajaran yang kemudian diberi nama Rentjana Pelajaran terurai 1952. Kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional hal tersebut dikarenakan kurikulum ini adalah penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya. Hal yang paling utama pada kurikulum ini adalah rencana pelajaran harus dihubungkan dalam kehidupan sehari-hari, serta guru mengajar hanya pada satu mata pelajaran saja (Salamah, 2018).

Kurikulum 1964 “ Renjana Pendidikan 1964

Kurikulum ini merupakan penyempurnaan dari sistem pendidikan sebelumnya. Hal utama pada penerapan kurikulum ini adalah keinginan pemerintah untuk menjadikan rakyat tahu serta memperoleh pendidikan akademik, sehingga pancawardhana digunakan sebagai pusat pembelajaran dengan pengembangan moral, kecerdasan emosional, artistik, keprigelan dan jasmani. Selain itu, mata pelajaran diklasifikasikan dalam lima kelompok bidang studi yakni : moral, kecerdasan, emosional/ artisik, keprigelan (keterampilan, dan jasmaniah (Rahmi, 2021).

Kurikulum 1968

Kurikulum 1968 bertujuan untuk menciptakan manusia yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila serta memiliki keterampilan jasmani, moral, melaksanakan agama sesuai kepercayaan dan berbudi pekerti. Penerapan kurikulum 1968 menampakkan perbedaan yang sebelumnya berfokus pada sistem pancawardhana kemudian berfokus pada tiga hal yakni pembina Pancasila, kecakapan khusus dan pengetahuan dasar (Abdurrahman & Astuti, 2019).

Kurikulum 1975

Dalam kurikulum 1975 berfokus pada keefektifan dan keefisienan tujuan pendidikan. pengaruh konsep manajemen seperti metode, materi dan tujuan pengajaran menjadi dasar lahirnya kurikulum 1975 yang disusun secara rinci dan dikenal dengan sebutan “satuan pelajaran yaitu rencana pelajaran setiap satuan bahasa. Adapun perincian yang dilakukan adalah :

- a. Tujuan instruksional umum (TIU)
- b. Tujuan Instruksional khusus (TIK)
- c. Materi, alat, serta kegiatan mengajar dan evaluasi (Nurhalim, 2018).

Kurikulum 1984

Kurikulum ini merupakan penyempurnaan kurikulum 1975. Pada kurikulum ini posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar. Mulai dari pengamatan, pengelompokan, mendiskusikan, hingga melaporkan yang dikenal dengan sebutan Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA) akan tetapi hal tersebut tidak mampu diterapkan dengan baik pada proses pembelajaran dikarenakan kurangnya kemampuan menafsirkan CBSA yang mengakibatkan banyaknya penolakan akan sistem tersebut (Nurhalim, 2018).

Kurikulum 1994 dan suplemen kurikulum 1999

Kurikulum ini adalah penggabungan kurikulum 1975 dan 1984. Kurikulum ini menekankan pada tujuan pelajaran dari muatan nasional sampai muatan lokal. Materi muatan lokal yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing. Akan tetapi hal

tersebut dianggap menimbulkan beban siswa yang terlalu berat sehingga dikenal suplemen kurikulum 1999 tetapi perubahannya lebih pada menambah sejumlah materi pelajaran saja (Nurhayati, 2022).

Kurikulum 2004 KBK (Kurikulum berbasis kompetensi)

Kurikulum ini merupakan kurikulum berbasis kompetensi yang didalamnya mengandung tiga unsur pokok yakni : kesesuaian pemilihan kompetensi, indikator-indikator evaluasi yang spesifik dalam mencapai kompetensi yang berhasil serta pengembangan pembelajaran. Hal mendasar yang ada pada kurikulum ini adalah berfokus pada pencapaian keterampilan peserta didik baik secara pribadi maupun klasikal, ketercapaian hasil belajar dan keberagaman. Proses pembelajaranpun tidak menggunakan satu metode akan tetapi menerapkan metode ajar yang bervariasi serta sumber materi memanfaatkan berabagai sumber (Nurhalim, 2018).

Kurikulum 2006 “ KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan)”

Kurikulum 2006 lebih berfokus pada ketercapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar (KD). Guru selanjutnya menyusun silabus yang sesuai dengan KD untuk menentukan langka-langka pembelajaran serta evaluasi yang akan menentukan sejauh mana ketercapaian belajar peserta didik yang sesuai dengan kondisi sekolah dan daerah. KTSP (Kurikulum tingkat satuan pendidikan) merupakan tanggung jawab se.kolah dalam pe.nyusunannya dan dibawah binaan se.rta pe.me.taan dinas pe.ndidikan dae.rah dan wilayah se.te.mpat (Sari, 2022).

Kurikulum 2013

Kurikulum 2013 me.rupakan kurikulum yang be.rfokus pada kompe.te.nsi-kompe.te.nasi te.rte.ntu ole.h pe.se.rta didik. Se.jumlah kompe.te.nsi dan se.pe.rangkat tujuan pe.mbe.lajaran adalah bagian dari kurikulum 2013 yang diatur se.hingga tujuan pe.mbe.lajaran dapat te.rlihat dan te.rcapai de.ngan me.lihat pe.rilaku se.rta ke.mampuan ke.te.rampilan pada pe.se.rta didik. Untuk me.ncapai tujuan kurikulum me.rdeka, guru diharapkan mampu be.rsikap profe.sional de.ngan me.nyusun re.ncana pe.mbe.lajaran de.ngan e.fe.ktif dan be.rmakna se.rta mampu me.nge.lolah prose.s pe.mbe.lajaran de.ngan me.nggunakan me.tode. yang se.suai dan me.ne.ntukan krite.ria ke.be.rhasilan tujuan pe.mbe.lajaran (Nurhalim, 2018).

Kurikulum Merdeka

Kurikulum merdeka merupakan pengembangan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh kemendikbudristekdikti untuk meningkatkan bahwa memulihkan pembelajaran dari kritis yang dialami selama ini. Kontribusi besar kurikulum ini adalah sumber daya manusia guru. Guru menjadi bagian yang harus terus ditata dan perlu ditingkatkan potensinya secara berkala. Terdapat tiga tahapan implementasi kurikulum merdeka sehingga terwujud pada satuan pendidikan yakni, mandiri belajar, mandiri berubah dan mandiri berbagi (Nabila, 2023).

Pengembangan kurikulum di Indonesia menurut (Rahmadhani et al., 2022), dipengaruhi beberapa faktor diantaranya :

a. Filosofis filsafat

Adalah hal yang berperan penting dalam pengembangan kurikulum. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya filsafat pendidikan maka akan diketahui aliran-aliran filsafat seperti perenialisme, progresivisme, essensialisme, serta rekonstruktivisme. Hal-hal ini akan berpengaruh dalam menentukan konsep implementasi kurikulum yang dikembangkan.

b. Psikologis

Terdapat dua psikologi utama yang menjadi dasar pengembangan kurikulum yakni: Psikologi perkembangan dalam hal ini berfungsi dalam menelaah bagaimana sikap individu terhadap perkembangannya, dan yang kedua adalah psikologi belajar.

c. Pembangunan negara dan perkembangan dunia.

Perkembangan negara dan perkembangan dunia juga memiliki pengaruh terhadap perkembangan kurikulum. Suatu negara maju bahkan negara berkembang tidak harus selalu mempunyai kurikulum statis, oleh karena itu kurikulum perlu adanya perubahan sesuai dengan kemajuan zaman, teknologi dan sains.

d. Ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK)

Perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi kedepan akan semakin mengaloi perubahan, dan tidak dapat dipastikan akan bagaimana. Oleh karena itu, kurikulum sudah seharusnya dapat berkembang mengikuti laju perkembangan IPTEK sehingga peserta didik serta semua pihak yang terkait akan dapat mengimbangnya dengan perkembangan zaman.

2. Peran Stakeholder Dalam Pengembangan Kurikulum Pada Lingkungan Pendidikan

Secara etimologi stakeholder berasal dari bahasa Inggris yaitu “Stake” yang berarti “Pancang” dan “Holder” yang berarti “Pemegang”. Sehingga Stakeholder berarti “Pemegang Pancang”(Sunardi, 2023). Dalam pendidikan stakeholder merupakan pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap keberhasilan sekolah atau sistem pendidikan. stakeholder dalam dunia pendidikan diantaranya adalah pemerintah sebagai pemangku kebijakan tertinggi, masyarakat sebagai pengendali serta lembaga pendidikan sebagai pelaksana (Putra, 2021). Stakeholder pendidikan dikelompokkan dalam dua bagian yaitu stakeholder eksternal dalam hal ini segala pihak terkait yang berhubungan dengan lembaga pendidikan secara tidak langsung seperti komite sekolah, orang tua murid, pengawas dan lainnya yang kedua adalah stakeholder internal dalam hal ini semua pihak yang berada di lingkungan lembaga pendidikan secara langsung seperti kepala sekolah, guru, siswa, tata usaha dan lainnya (Sunardi, 2023).

Stakeholder dalam pengembangan kurikulum sangat dibutuhkan untuk berpartisipasi sehingga relevansi isi kurikulum, dengan kebutuhan aktual peserta didik dapat terlihat dengan baik. Dengan melibatkan berbagai pandangan akan tercipta bagaimana kepemilikan bersama terhadap kurikulum. Partisipasi stakeholder dalam mengembangkan kurikulum adalah cara pendekatan yang memperlihatkan pentingnya semua pihak dalam menciptakan tujuan pendidikan yang berhasil.

Partisipasi stakeholder dalam pengembangan kurikulum pada lingkungan pendidikan didasari oleh beberapa teori dan konsep menurut (Sholeh et al., 2023) yaitu :

a. Teori Partisipasi. Yang berkaitan dengan beberapa teori lainnya yakni;

1. Teori demorasi pendidikan.

Dalam teori ini menjelaskan bagaimana peran semua pihak untuk berpartisipasi dalam pembentukan kebijakan pendidikan. Stakeholder dalam berpartisipasi merupakan refleksi dari prinsip demokrasi dalam pengambilan keputusan dalam satuan pendidikan.

2. Teori Konstruktivis.

Pada teori konstruktivis menjelaskan bahwa perbedaan individu akan berpengaruh terhadap efektivitas pembelajaran. Oleh karena itu, partisipasi stakeholder dalam pengembangan kurikulum akan sesuai dengan kebutuhan dan perbedaan pada peserta didik.

3. Teori keterlibatan Masyarakat

Pada teori ini lebih menekankan bagaimana peran masyarakat untuk memberikan perhatian terhadap pendidikan. Dalam hal ini bagaimana keterlibatan orang tua, komunitas, komite sekolah serta tokoh-tokoh penting lainnya untuk memperkuat relevansi kurikulum

b. Konsep Partisipasi Stakeholder dalam pengembangan kurikulum. Dalam hal terdiri dari beberapa konsep terkait menurut (Sholeh et al., 2023) yaitu:

1. Inklusi adalah mereka yang terlibat dalam lembaga pendidikan seperti guru, orang, kepala sekolah, komite sekolah, dan masyarakat untuk menyusun pengembangan kurikulum.
2. Keterbukaan dan transparansi dalam hal ini semua pihak berhak dalam mengetahui pengembangan kurikulum serta berhak dalam memberikan masukan secara jujur dan terbuka.
3. Kolaborasi, dalam hal ini akan terlihat kolaborasi semua stakeholder dalam mengidentifikasi masalah, tujuan, serta strategi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah dan mencapai tujuan.
4. Pemahaman kebutuhan; dalam hal ini stakeholder akan berpartisipasi dalam mengidentifikasi setiap kebutuhan dan tantangan yang dibutuhkan pada satuan pendidikan.
5. Pemahaman konteks ; stakeholder dalam hal ini memiliki pemahaman yang beragam dalam konteks sosial, budaya, serta agama yang akan berfungsi dalam menyesuaikan kurikulum agar lebih relevan.
6. Penerimaan dan dukungan: keterlibatan stakeholder pada proses pengembangan kurikulum akan meningkatkan dukungan terhadap implementasi kurikulum yang dihasilkan.

Dalam pengembangan kurikulum di lingkungan pendidikan, stakeholder mengambil peran penting dan signifikan untuk memperkaya kurikulum. Keterlibatan stakeholder akan membantu memastikan bahwa kurikulum tidak hanya relevan dengan kebutuhan peserta didik atau kebutuhan lingkungan sekolah akan tetapi juga berpengaruh terhadap perubahan sosial dan perkembangan zaman.

Managemen pendidikan sangat membutuhkan peran stakeholder untuk meningkatkan konsep bukan hanya sekedar menjadi penerima kebijakan. Keberagaman peran dan perspektif pada stakeholder sangat menentukan arah kebijakan pendidikan yang lebih relevan dengan kebutuhan lokal dan global. Perlu ditekankan bahwa keterlibatan setiap pemangku kepentingan secara aktif akan tercipta gagasan-gagasan yang dapat dihargai dan disepakati (Jaenudin, 2024).

Stakeholder di lingkungan pendidikan diharapkan memberikan kontribusi tinggi dalam pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Hal tersebut dikarenakan stakeholder secara umum adalah pelaksana program pendidikan yang menentukan keberhasilan pencapaian mutu pendidikan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia dalam pembukaan undang-undang dasar 1945.

3. Managemen penerapan kurikulum pada lingkungan pendidikan.

Manajemen penerapan kurikulum pada lingkungan pendidikan bukan berarti hanya akan dilaksanakan oleh peserta didik, akan tetapi dilaksanakan pula oleh para pendidik atau guru. Bagi peserta didik fungsi kurikulum adalah pengorganisasian pengalaman belajar yang tersusun serta disiapkan untuk peserta didik yang merupakan salah satu konsumen kurikulum. Hal tersebut diharapkan akan memberikan pengalaman baru yang kelak dapat dikembangkannya sejalan dengan perkembangannya dalam menjalani kehidupan. Kurikulum sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan diharapkan akan memberikan

program-program yang sesuai dengan zaman peserta didik tetapi bersifat sosiokultural dikarenakan zaman dimana kedua orangtuanya berada.

Selain bagi peserta didik, guru juga memiliki peran penting dalam memfungsikan kurikulum. Dimana guru dapat mempedomani kurikulum dalam melaksanakan tugas, mengorganisir pengalaman belajar, serta menjadi pedoman dalam melakukan evaluasi terhadap perkembangan anak didik. Dengan adanya kurikulum, tugas seorang tenaga pendidik akan lebih terarah.

Pendidik dalam lingkungan pendidikan adalah peran yang penting pada proses pendidikan, dan merupakan salah satu komponen yang berperan aktif dalam berkomunikasi dengan peserta didik. Kurikulum sebagai pedoman berfungsi sebagai sarana untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan (Huda, 2017).

Pelaksanaan kurikulum dalam manajemen pengorganisasian adalah tindakan yang berhubungan dengan segala tindakan perencanaan, perincian, serta pembagian segala tugas yang diharapkan akan selesai. Organisasi kurikulum adalah pola dari bahan yang bertujuan untuk mempermudah peserta didik untuk melaksanakan kegiatan belajar hingga tujuan pembelajaran akan tercapai secara efektif dan optimal. Pengorganisasian kurikulum berkaitan dengan penyusunan bahan pelajaran pada kurikulum tersebut, sehingga diperlukan beberapa faktor yang akan memberikan pengaruh dalam pengorganisasian kurikulum menurut (Huda, 2017), diantaranya :

- a. Ruang lingkup dan urutan bahan pelajaran. Hal ini merupakan salah satu faktor yang akan mempertimbangkan adanya materi pelajaran, yang didalamnya terdapat aspek peserta didik yang mencakup semua kebutuhan peserta didik serta minat dan bakatnya, serta untuk aspek masyarakat yang mencakup nilai budaya dan sosial. Dalam hal ini adanya materi ajar bukan hanya pengadaan akan tetapi bagaimana materi tersebut dapat disajikan dan terstruktur sesuai kurikulum.
- b. Kontinuitas kurikulum dalam hal ini perlu diperhatikan adalah substansi bahan pelajaran yang diberikan kepada peserta didik dapat terarah dan terstruktur.
- c. Keseimbangan bahan pelajaran dalam hal ini perlu menjadi perhatian dimana terdapat kesesuaian antara bahan ajar dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Sehingga kesesuaian substansi isi kurikulum harus diperhatikan dalam melihat kepentingan peserta didik sebagai pribadi, masyarakat serta sebagai objek dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sehingga akomodasi isi kurikulum harus diperjelas seperti aspek etiketa, intelektual, moral, sosial-emosional, profesional, religius, seni-aspirasi serta kinestetik dan semuanya.
- d. Alokasi Waktu dalam hal ini perlu diperhatikan adalah waktu pada setiap bahan materi dalam kurikulum harus sesuai. Sehingga dalam penyusunan kalender pendidikan perlu diperhatikan jumlah jam efektif untuk menetapkan bahan ajar.

Kurikulum yang terlaksana dengan baik tentu karena adanya manajemen pendidikan, pelaksanaan kurikulum. Dalam hal ini ketersediaan fasilitas materil, personal serta kondisi-kondisi supaya adalah tugas manajemen sehingga kurikulum dapat terlaksana dengan baik. Pelaksana kurikulum terbagi menjadi dua bagian yakni :

- a. Pelaksana Kurikulum tingkat sekolah. Dimana kepala sekolah memiliki peran penting dalam menyusun kurikulum mulai dari penyusunan kalender akademik, jadwal pelajaran, pengaturan tugas dan kewajiban guru serta segala tata usaha dalam mewujudkan tujuan kurikulum.
- b. Pelaksana kurikulum tingkat kelas. Dalam hal ini guru-guru diberikan tugas yang terdiri atas tiga bagian yakni :
 - 1) Kegiatan proses belajar mengajar
 - 2) Pembina ekstrakurikuler.

3) Kegiatan Bimbingan belajar dalam peningkatan potensi peserta didik.

Struktur kurikulum, sumber daya manusia, administrasi, sarana prasarana, iklim pendidikan, serta kerjasama dengan semua pihak yang terlibat merupakan persiapan paling utama dalam pengimplementasian kurikulum, sehingga perlu diperhatikan secara menyeluruh sebelum menjalankan kurikulum tersebut (Anggraini et al., 2022).

KESIMPULAN

Kurikulum adalah suatu hal yang berperan strategis pada sistem pendidikan. Dimana kurikulum sudah seharusnya mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga peserta didik serta semua pihak yang terkait akan dapat mengimbangnya dengan perkembangan zaman. Stakeholder di lingkungan pendidikan diharapkan memberikan kontribusi tinggi dalam pengembangan kurikulum untuk meningkatkan mutu pendidikan. Hal tersebut dikarenakan stakeholder secara umum adalah pelaksana program pendidikan yang menentukan keberhasilan pencapaian mutu pendidikan. Kerjasama dengan semua pihak yang terlibat merupakan persiapan paling utama dalam pengimplementasian kurikulum, sehingga perlu diperhatikan secara menyeluruh sebelum menjalankan kurikulum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, & Astuti, F. herna. (2019). Analisis Pengembangan Kurikulum Model Beauchamp Di Madrasah Ibtidaiyah Nurul Islam. *Realita Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, 3(5), 479. <https://e-journal.undikma.ac.id/index.php/realita/article/view/2112/1461#>
- Anggraini, H., Haryono, S. E., Muntomimah, S., Wijayanti, R., & Akbar, M. R. (2022). Strategi Pengembangan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka Berbasis Individual Differences. *Jurnal Ilmiah Potensia*, 7(1), 64–74. <https://doi.org/10.33369/jip.7.1>.
- Fahmi, F., & Bitasari, W. (2021). Revitalisasi Implementasi Kurikulum Pendidikan. *Al-Fikru: Jurnal Ilmiah*, 14(2), 81–91. <https://doi.org/10.51672/alfikru.v14i2.30>
- Huda, N. (2017). Manajemen Pengembangan Kurikulum. *Al-Tanzim : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 1(2), 52–75. <https://doi.org/10.33650/al-tanzim.v1i2.113>
- Jaenudin. (2024). Analisis Peran Stakeholder dalam Pengambilan Keputusan Manajemen Sekolah : Perspektif Pendidikan. *Journal of Education Research*, 5(1), 939–944.
- Nabila, A. (2023). Analisis Pengembangan Kurikulum Sebagai Dasar Pendidikan Di Indonesia. 1–9. <https://thesiscomm ons.org/c5zmv/download?format=pdf>
- Nurhalim, M. (2018). Analisis Perkembangan Kurikulum di Indonesia (Sebuah Tinjauan Desain Dan Pendekatan). *INSANIA : Jurnal Pemikiran Alternatif Kependidikan*, 16(3), 339–356. <https://doi.org/10.24090/insania.v16i3.1597>
- Nurhayati, M. adyna M. dkk. (2022). Pengembangan kurikulum (R. widayanti ulfa adilla, Zumrotul ula (ed.)). Hamjah Diha Foundation.
- Putra, M. susila. (2021). Peran Stakeholders Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Melalui Pengembangan Evaluasi Kurikulum Prodi Sastra Agama Dan Pendidikan Bahasa Bali. *Jurnal Sastra Agama Dan Pendidikan Bahasa Bali*, 2(2).
- Rahmadhani, P., Widya, D., & Setiawati, M. (2022). Dampak Transisi Kurikulum 2013 Ke Kurikulum Merdeka Belajar Terhadap Minat Belajar Siswa. *JUPEIS : Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 1(4), 41–49. <https://doi.org/10.57218/jupeis.vol1.iss4.321>
- Rahmi, E. (2021). Analisis Pengembangan Kurikulum Di Lembaga Pendidikan Islam. *El-Rusyd: Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah STIT Ahlussunnah Bukittinggi*, 6(1), 60–72.
- Salamah, U. (2018). Pengembangan dan Analisis kurikulum (p. 3).
- Sari, E. C. (2022). Kurikulum Di Indonesia: Tinjauan Perkembangan Kurikulum Pendidikan. *Inculco Journal of Christian Education*, 2(2), 93–109. <https://doi.org/10.59404/ijce.v2i2.54>
- Sholeh, M. I., Fathurro'uf, M., Sokip, S., Syafi'i, A., 'Azah, N., & Andayani, D. (2023). Partisipasi Stakeholder dalam Pengembangan Kurikulum Pendidikan Islam di Pesantren. *Edu Journal Innovation in Learning and Education*, 1(2), 121–141. <https://doi.org/10.55352>

/edu.v1i2.759

Sunardi, S. (2023). Peran Stakeholder Internal Dalam Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan Di SMP Negeri 1 Wonosalam Jombang. *Irsyaduna: Jurnal Studi Kemahasiswaan*, 3(2), 160–174. <https://doi.org/10.54437/irsyaduna.v3i2.1156>